



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Desember 2020

Nomor : 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Tindaklanjut Pelaksanaan  
Pemeriksaan Kesehatan yang  
berkaitan dengan *Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19)* bagi  
KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
(yang melaksanakan *Pemilihan Tahun 2020*  
*sebagaimana terlampir*)  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal hasil Pemeriksaan dengan metode *rapid test* KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dinyatakan reaktif maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemetaan sebaran KPPS yang dinyatakan reaktif pada tiap TPS;
2. Dalam hal jumlah KPPS yang dinyatakan reaktif pada suatu TPS lebih dari 2 (dua), maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah tindaklanjut sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas yang menangani Covid-19 di masing-masing daerah untuk pelaksanaan *Swab PCR* dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam melaksanakan *Swab PCR* wajib memperhatikan keluarnya hasil *Swab PCR* paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara;

- c. Dalam hal tidak dapat dilakukan *Swab PCR*, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas yang menangani Covid-19 di masing-masing daerah atau secara swakelola untuk pelaksanaan *rapid test* kedua bagi yang dinyatakan reaktif dengan memperhatikan keluarnya hasil *rapid test* kedua paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara;
  - d. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan *Swab PCR* maupun *rapid test* kedua atau KPPS tetap dinyatakan reaktif/Positif Covid-19, maka KPPS dinyatakan berhalangan tetap dengan diberikan surat pemberhentian sebagai anggota KPPS;
  - e. Apabila jumlah KPPS yang tersisa kurang dari 5 (lima) orang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat 5a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota maka dapat dilakukan penggantian KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan KPPS sampai jumlah KPPS di setiap TPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
3. Dalam hal KPPS pada suatu TPS yang dinyatakan reaktif pada *rapid test* sebagaimana angka 1 (satu) berjumlah 2 (dua) orang atau kurang, maka KPPS yang dinyatakan reaktif melakukan isolasi mandiri dan/atau rawat inap dan kembali bertugas setelah mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas oleh pihak yang berwenang dalam urusan kesehatan;
  4. KPPS yang melakukan isolasi mandiri dan/atau rawat inap dan masih tetap melaksanakan tugas sebagaimana angka 3 (tiga) dapat diberikan honor sesuai ketentuan perundang-undangan.
  5. Dalam hal terdapat KPPS yang dinyatakan Reaktif/Positif 2 (dua) hari sebelum Pemungutan Suara atau kurang atau tidak terdapat pengganti KPPS yang mengakibatkan jumlah KPPS di suatu TPS kurang dari 5 (lima) orang, PPS dapat menunjuk KPPS dari TPS terdekat/sekitar dengan ketentuan jumlah KPPS di setiap TPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan melakukan perubahan terhadap Keputusan Pengangkatan KPPS bagi KPPS yang pindah lokasi TPS.
  6. KPPS yang dinyatakan Reaktif/Positif sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dinyatakan berhalangan tetap dengan diberikan surat pemberhentian sebagai anggota KPPS.
  7. Dalam hal KPPS yang menjadi Petugas Sirekap dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19, PPS menunjuk pengganti Petugas Sirekap dan menuangkannya dalam Keputusan terkait Petugas Sirekap serta segera meminta akses penggunaan Sirekap.
  8. KPPS yang dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19 dan dilakukan penggantian maka yang mendapatkan honor adalah KPPS pengganti yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

9. KPPS yang mengalami kecelakaan kerja dan dilakukan pergantian KPPS, dapat mengajukan santuan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Ketentuan terkait Penggantian Petugas Ketertiban TPS yang dinyatakan reaktif/positif dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
11. KPU Kabupaten/Kota yang telah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bagi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum surat dinas ini diterbitkan dapat menyesuaikan pelaksanaan tindaklanjutnya sesuai dengan surat dinas ini dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**



  
**Arief Budiman**

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lampiran

Surat Nomor : 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020

Tanggal : 4 Desember 2020

No	NAMA SATKER
1	KPU Provinsi Sumatera Utara
2	KPU Provinsi Sumatra Barat
3	KPU Provinsi Riau
4	KPU Provinsi Sumatera Selatan
5	KPU Provinsi Lampung
6	KPU Provinsi Kep. Babel
7	KPU Provinsi Kepri
8	KPU Provinsi Jawa Barat
9	KPU Provinsi Jawa Tengah
10	KPU Provinsi Jawa Timur
11	KPU Provinsi Banten
12	KPU Provinsi Bali
13	KPU Provinsi NTB
14	KPU Provinsi NTT
15	KPU Provinsi Kalimantan Barat
16	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
17	KPU Provinsi Kalimantan Selatan
18	KPU Provinsi Kalimantan Timur
19	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
20	KPU Provinsi Sulawesi Tengah
21	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
22	KPU Provinsi Sulawesi Utara
23	KPU Provinsi Gorontalo
24	KPU Provinsi Sulawesi Barat
25	KPU Provinsi Maluku
26	KPU Provinsi Maluku Utara
27	KPU D.I Yogyakarta
28	KPU Provinsi Bengkulu
29	KPU Provinsi Jambi
30	KPU Provinsi Papua Barat
31	KPU Provinsi Papua
32	KPU Provinsi Kalimantan Utara
<b>261 PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI-WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA</b>	
<b>JAWA BARAT (8 Kabupaten/kota)</b>	
1	KPU Kab. Sukabumi
2	KPU Kab. Cianjur
3	KPU Kab. Karawang
4	KPU Kab. Bandung
5	KPU Kab. Tasikmalaya
6	KPU Kab. Indramayu

No	NAMA SATKER
7	KPU Kota Depok
8	KPU Kab. Pangandaran
<b>JAWA TENGAH (21 Kabupaten/Kota)</b>	
9	KPU Kab. Semarang
10	KPU Kab. Kendal
11	KPU Kab. Demak
12	KPU Kab. Grobogan
13	KPU Kab. Pekalongan
14	KPU Kab. Pemalang
15	KPU Kab. Rembang
16	KPU Kab. Blorarr
17	KPU Kab. Purbalingga
18	KPU Kab. Wonosobo
19	KPU Kab. Purworejo
20	KPU Kab. Kebumen
21	KPU Kab. Klaten
22	KPU Kab. Boyolali
23	KPU Kab. Sragen
24	KPU Kab. Sukoharjo
25	KPU Kab. Wonogiri
26	KPU Kota Semarang
27	KPU Kota Pekalongan
28	KPU Kota Magelang
29	KPU Kota Surakarta
<b>DI YOGYAKARTA (3 Kabupaten/Kota)</b>	
30	KPU Kab. Bantul
31	KPU Kab. Gunungkidul
32	KPU Kab. Sleman
<b>JAWA TIMUR (19 Kabupaten/Kota)</b>	
33	KPU Kab. Banyuwangi
34	KPU Kab. Blitar
35	KPU Kab. Gresik
36	KPU Kab. Jember
37	KPU Kab. Kediri
38	KPU Kab. Lamongan
39	KPU Kab. Malang
40	KPU Kab. Mojokerto
41	KPU Kab. Ngawi
42	KPU Kab. Pacitan
43	KPU Kab. Ponorogo
44	KPU Kab. Sidoarjo
45	KPU Kab. Situbondo
46	KPU Kab. Sumenep
47	KPU Kab. Trenggalek
48	KPU Kab. Tuban

No	NAMA SATKER
49	KPU Kota Surabaya
50	KPU Kota Blitar
51	KPU Kota Pasuruan
<b>SUMATERA UTARA (23 Kabupaten/Kota)</b>	
52	KPU Kab. Tapanuli Selatan
53	KPU Kab. Nias
54	KPU Kab. Tanah Karo
55	KPU Kab. Serdang Bedagai
56	KPU Kab. Simalungun
57	KPU Kab. Asahan
58	KPU Kab. Labuhan Batu
59	KPU Kab. Toba Samosir
60	KPU Kab. Samosir
61	KPU Kab. Mandailing Natal
62	KPU Kab. Nias Selatan
63	KPU Kab. Pakpak Bharat
64	KPU Kab. Humbang Hasundutan
65	KPU Kota Medan
66	KPU Kota Pematang Siantar
67	KPU Kota Sibolga
68	KPU Kota Tanjung Balai
69	KPU Kota Binjai
70	KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
71	KPU Kab. Labuhan Batu Utara
72	KPU Kab. Nias Utara
73	KPU Kab. Nias Barat
74	KPU Kota Gunung Sitoli
<b>SUMATERA BARAT (13 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
75	KPU Kab. Pesisir Selatan
76	KPU Kab. Solok
77	KPU Kab. Sijunjung
78	KPU Kab. Tanah Datar
79	KPU Kab. Padang Pariaman
80	KPU Kab. Agam
81	KPU Kab. Lima Puluh Kota
82	KPU Kab. Pasaman
83	KPU Kab. Kepulauan Mentawai
84	KPU Kab. Dharmasraya
85	KPU Kab. Solok Selatan
86	KPU Kab. Pasaman Barat
87	KPU Kota Padang
88	KPU Kota Solok
89	KPU Kota Sawahlunto
90	KPU Kota Padang Panjang
91	KPU Kota Bukittinggi

No	NAMA SATKER
92	KPU Kota Payakumbuh
93	KPU Kota Pariaman
<b>RIAU (9 Kabupaten/Kota)</b>	
94	KPU Kab. Kuantan Singingi
95	KPU Kab. Indragiri Hulu
96	KPU Kab. Pelalawan
97	KPU Kab. Siak
98	KPU Kab. Rokan Hulu
99	KPU Kab. Bengkalis
100	KPU Kab. Rokan Hilir
101	KPU Kota Dumai
102	KPU Kab. Kepulauan Meranti
<b>JAMBI (5 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
103	KPU Kota Sungai Penuh
104	KPU Kab. Kerinci
105	KPU Kab. Merangin
106	KPU Kab. Sarolangun
107	KPU Kab. Batanghari
108	KPU Kab. Muaro Jambi
109	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
110	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
111	KPU Kab. Bungo
112	KPU Kab. Tebo
113	KPU Kota Jambi
<b>SUMATERA SELATAN (7 Kabupaten/Kota)</b>	
114	KPU Kab. Musi Rawas
115	KPU Kab. Ogan Ilir
116	KPU Kab. Ogan Komering Ulu
117	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Timur
118	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
119	KPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
120	KPU Kab. Musi Rawas Utara
<b>LAMPUNG (8 Kabupaten/Kota)</b>	
121	KPU Kab. Lampung Tengah
122	KPU Kab. Lampung Timur
123	KPU Kab. Way Kanan
124	KPU Kab. Lampung Selatan
125	KPU Kota Metro
126	KPU Kota Bandar Lampung
127	KPU Kab. Pesawaran
128	KPU Kab. Pesisir Barat
<b>KALIMANTAN BARAT (7 Kabupaten/Kota)</b>	
129	KPU Kab. Sambas
130	KPU Kab. Bengkayang
131	KPU Kab. Sekadau

No	NAMA SATKER
132	KPU Kab. Ketapang
133	KPU Kab. Sintang
134	KPU Kab. Melawi
135	KPU Kab. Kapuas Hulu
<b>KALIMANTAN TENGAH (1 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
136	KPU Kab. Kotawaringin Barat
137	KPU Kab. Kotawaringin Timur
138	KPU Kab. Kapuas
139	KPU Kab. Barito Selatan
140	KPU Kab. Barito Utara
141	KPU Kab. Katingan
142	KPU Kab. Seruyan
143	KPU Kab. Sukamara
144	KPU Kab. Lamandau
145	KPU Kab. Gunung Mas
146	KPU Kab. Pulang Pisau
147	KPU Kab. Murung Raya
148	KPU Kab. Barito Timur
149	KPU Kab. Kota Palangkaraya
<b>KALIMANTAN SELATAN (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
150	KPU Kab. Tanah Laut
151	KPU Kab. Kotabaru
152	KPU Kab. Banjar
153	KPU Kab. Barito Kuala
154	KPU Kab. Tapin
155	KPU Kab. Hulu Sungai Selatan
156	KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
157	KPU Kab. Hulu Sungai Utara
158	KPU Kab. Tabalong
159	KPU Kab. Tanah Bumbu
160	KPU Kab. Balangan
161	KPU Kota Banjarmasin
162	KPU Kota Banjarbaru
<b>KALIMANTAN TIMUR (9 Kabupaten/Kota)</b>	
163	KPU Kab. Kutai Timur
164	KPU Kab. Kutai Barat
165	KPU Kab. Berau
166	KPU Kab. Kutai Kartanegara
167	KPU Kab. Pasir
168	KPU Kota Bontang
169	KPU Kota Samarinda
170	KPU Kota Balikpapan
171	KPU Kab. Mahakam Ulu
<b>SULAWESI UTARA (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
172	KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur



No	NAMA SATKER
173	KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan
174	KPU Kab. Bolaang Mongondow
175	KPU Kab. Minahasa
176	KPU Kab. Kepulauan Sangihe
177	KPU Kab. Kepulauan Talaud
178	KPU Kab. Minahasa Selatan
179	KPU Kab. Minahasa Utara
180	KPU Kab. Minahasa Tenggara
181	KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara
182	KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
183	KPU Kota Manado
184	KPU Kota Bitung
185	KPU Kota Tomohon
186	KPU Kota Kotamobagu
<b>SULAWESI TENGAH (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
187	KPU Kab. Sigi
188	KPU Kab. Banggai
189	KPU Kab. Poso
190	KPU Kab. Donggala
191	KPU Kab. Tolitoli
192	KPU Kab. Buol
193	KPU Kab. Morowali
194	KPU Kab. Banggai Kepulauan
195	KPU Kab. Parigi Moutong
196	KPU Kab. Tojo Una-Una
197	KPU Kota Palu
198	KPU Kab. Banggai Laut
199	KPU Kab. Morowali Utara
<b>SULAWESI SELATAN (11 Kabupaten/Kota)</b>	
200	KPU Kab. Selayar
201	KPU Kab. Bulukumba
202	KPU Kab. Gowa
203	KPU Kab. Maros
204	KPU Kab. Pangkajene Kepulauan
205	KPU Kab. Barru
206	KPU Kab. Soppeng
207	KPU Kab. Tanatoraja
208	KPU Kab. Luwu Utara
209	KPU Kab. Luwu Timur
210	KPU Kab. Toraja Utara
<b>SULAWESI TENGGARA (7 Kabupaten/Kota)</b>	
211	KPU Kab. Kolaka Timur
212	KPU Kab. Muna
213	KPU Kab. Konawe Selatan
214	KPU Kab. Wakatobi

No	NAMA SATKER
215	KPU Kab. Konawe Utara
216	KPU Kab. Buton Utara
217	KPU Kab. Konawe Kepulauan
<b>MALUKU (4 Kabupaten/Kota)</b>	
218	KPU Kab. Seram Bagian Timur
219	KPU Kab. Kepulauan Aru
220	KPU Kab. Buru Selatan
221	KPU Kab. Maluku Barat Daya
<b>BALI (6 Kabupaten/Kota)</b>	
222	KPU Kab. Jembrana
223	KPU Kab. Karangasem
224	KPU Kab. Bangli
225	KPU Kab. Badung
226	KPU Kab. Tabanan
227	KPU Kota Denpasar
<b>NUSA TENGGARA BARAT (7 Kabupaten/Kota)</b>	
228	KPU Kab. Lombok Tengah
229	KPU Kab. Bima
230	KPU Kab. Sumbawa
231	KPU Kab. Dompu
232	KPU Kab. Sumbawa Barat
233	KPU Kota Mataram
234	KPU Kab. Lombok Utara
<b>NUSA TENGGARA TIMUR (9 Kabupaten/Kota)</b>	
235	KPU Kab. Belu
236	KPU Kab. Timor Tengah Utara
237	KPU Kab. Ngada
238	KPU Kab. Manggarai
239	KPU Kab. Sumba Timur
240	KPU Kab. Sumba Barat
241	KPU Kab. Manggarai Barat
242	KPU Kab. Sabu Raijua
243	KPU Kab. Malaka
<b>PAPUA (11 Kabupaten/Kota)</b>	
244	KPU Kab. Merauke
245	KPU Kab. Nabire
246	KPU Kab. Kerom
247	KPU Kab. Pegunungan Bintang
248	KPU Kab. Yahukimo
249	KPU Kab. Waropen
250	KPU Kab. Boven Digul
251	KPU Kab. Asmat
252	KPU Kab. Supiori
253	KPU Kab. Mamberamo
254	KPU Kab. Yalimo

No	NAMA SATKER
<b>BENGKULU (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
255	KPU Kab. Bengkulu Tengah
256	KPU Kab. Bengkulu Selatan
257	KPU Kab. Rejang Lebong
258	KPU Kab. Bengkulu Utara
259	KPU Kab. Kaur
260	KPU Kab. Seluma
261	KPU Kab. Mukomuko
262	KPU Kab. Lebong
263	KPU Kab. Kepahiang
264	KPU Kota Bengkulu
<b>MALUKU UTARA (8 Kabupaten/Kota)</b>	
265	KPU Kab. Halmahera Barat
266	KPU Kab. Halmahera Utara
267	KPU Kab. Halmahera Selatan
268	KPU Kab. Halmahera Timur
269	KPU Kab. Kepulauan Sula
270	KPU Kota Ternate
271	KPU Kota Tidore Kepulauan
272	KPU Kab. Pulau Taliabu
<b>BANTEN (4 Kabupaten/Kota)</b>	
273	KPU Kab. Serang
274	KPU Kab. Pandeglang
275	KPU Kota Cilegon
276	KPU Kota Tangerang Selatan
<b>BANGKA BELITUNG (4 Kabupaten/Kota)</b>	
277	KPU Kab. Belitung Timur
278	KPU Kab. Bangka Barat
279	KPU Kab. Bangka Tengah
280	KPU Kab. Bangka Selatan
<b>GORONTALO (3 Kabupaten/Kota)</b>	
281	KPU Kab. Gorontalo
282	KPU Kab. Bone Bolango
283	KPU Kab. Pohuwato
<b>KEPULAUAN RIAU (6 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
284	KPU Kab. Kepulauan Anambas
285	KPU Kab. Bintan
286	KPU Kab. Karimun
287	KPU Kab. Natuna
288	KPU Kab. Lingga
289	KPU Kota Batam
290	KPU Kota Tanjungpinang
<b>PAPUA BARAT (9 Kabupaten/Kota)</b>	
291	KPU Kab. Fak-Fak
292	KPU Kab. Manokwari

No	NAMA SATKER
293	KPU Kab. Sorong Selatan
294	KPU Kab. Raja Ampat
295	KPU Kab. Kaimana
296	KPU Kab. Teluk Bintuni
297	KPU Kab. Teluk Wondama
298	KPU Kab. Pegunungan Arfak
299	KPU Kab. Manokwari Selatan
<b>SULAWESI BARAT (4 Kabupaten/Kota)</b>	
300	KPU Kab. Majene
301	KPU Kab. Mamuju
302	KPU Kab. Pasang Kayu
303	KPU Kab. Mamuju Tengah
<b>KALIMANTAN UTARA (4 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur</b>	
304	KPU Kab. Bulungan
305	KPU Kab. Nunukan
306	KPU Kab. Malinau
307	KPU Kab. Tana Tidung
308	KPU Kota Tarakan
<b>SULAWESI SELATAN (1 Kota)</b>	
309	KPU Kota Makassar